



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
UNIT KERJA : DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. NURDIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 492108

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.479.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 480 m2/312 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000		
2. Tanah Seluas 965 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 579.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , Rp. 400.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	284.000.000
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOBIL, KIA RIO 1.4 MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA AEROX 155 CIBERCITY Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	41.423.961
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.804.723.961



III. HUTANG

Rp. 78.690.059

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.726.033.902

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.